

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Walaupun sebagai produsen kakao terbesar ke-3 di dunia, tetapi dalam hal ekspor ke pasar UE, Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 yaitu dengan pangsa hanya 2,46%, jauh dibawah kemampuan produksinya sekitar 1/6 dari total produksi dunia. Rendahnya pangsa Indonesia di pasar UE berkaitan erat dengan beberapa hal seperti: tingkat persaingan yang cukup tinggi, rendahnya mutu kakao yang diproduksi Indonesia, dan belum dapat dipenuhinya permintaan industri coklat UE yang menginginkan kakao yang telah difermentasi.

Negara pesaing utama Indonesia di pasar Uni Eropa adalah Pantai Gading dengan pangsa pasar 41,54 %, Ghana dengan pangsa pasar 19,54%, Nigeria dengan pangsa pasar 9,20%, Swiss dengan pangsa pasar 7,27% dan Cameroon dengan pangsa pasar 5,21%. Daya saing produk dari negara pesaing Indonesia di pasar UE ini semakin kuat dengan adanya preferensi pembebasan bea masuk bagi negara miskin yang ditetapkan didalam skema *Everything but Arms* (EBA), GSP-UE, pembebasan bea masuk bagi Negara *African, Caribbean, and Pacific countries* (APC), dan *Free Trade Agreement* (FTA).

Peluang ekspor biji kakao Indonesia ke pasar UE sebenarnya masih terbuka luas karena industri coklat UE telah menyampaikan kepada asosiasi importir untuk mengimpor dari negara diluar Afrika Barat, karena kondisi politik di negara tersebut khususnya Pantai Gading saat ini kurang kondusif dan peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh produsen/eksportir Indonesia yang dianggap memiliki kondisi politik lebih stabil. Namun peluang ini belum dapat dimanfaatkan oleh produsen dan eksportir kakao Indonesia karena persyaratan standar mutu biji dan persyaratan fermentasi yang ditetapkan UE belum dapat dilaksanakan oleh semua produsen kakao di tanah air. Pertimbangan utama yang dilakukan oleh konsumen di Uni Eropa sebelum membeli suatu produk adalah didasarkan pada keamanan produk tersebut untuk dikonsumsi, produk tersebut ramah lingkungan dan cita rasa produk. Disamping alasan tersebut, beberapa alasan walaupun tidak begitu penting tetapi juga mendapat perhatian dari media

massa dan pemerintah, seperti perkebunan, kandungan pestisida dalam suatu produk, negara asal produk.

Data produksi maupun konsumsi kakao dunia menunjukkan adanya kestabilan dalam arti tidak terdapat fluktuasi kenaikan maupun penurunan yang menyolok. Indonesia merupakan penghasil kakao namun dari segi produktivitas masih rendah. Tersedianya lahan perkebunan kakao yang telah ada seharusnya dapat memberikan peluang untuk menghasilkan produksi kakao yang lebih besar lagi dengan pengelolaan tanaman yang tepat dan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan biji kakao dengan kualitas yang tinggi. Demikian pula dilihat dari segi pengolahan, kakao yang dihasilkan oleh petani tidak diolah secara baik difermentasi tetapi sebagian besar langsung diekspor dalam bentuk biji kakao sehingga nilai tambah yang dihasilkan sedikit. Indonesia sebenarnya berpotensi untuk menjadi produsen utama kakao dunia, apabila berbagai permasalahan utama yang dihadapi perkebunan kakao dapat diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan dan dikelola secara baik. Pengembangan usaha maupun investasi baru dibidang kakao dapat dilakukan mulai dari usaha pertanian primer yang menangani perkebunan kakao, usaha agribisnis hulu dalam memenuhi kebutuhan pertanian kakao seperti peralatan dan sarana produksi kakao, serta usaha agribisnis hilir yang memproduksi hasil olahan biji kakao.

Untuk melaksanakan program pengembangan agribisnis kakao tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar yang mencakup kegiatan investasi peningkatan produktivitas kebun, biaya pengendalian hama PBK, investasi pengembangan sistem usahatani terpadu, dan pengembangan industri hilir kakao serta pembangunan infrastruktur pendukungnya termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis kakao, dukungan kebijakan yang diperlukan Pemerintah perlu mendorong terbentuknya usaha-usaha industri coklat dan pemasaran yang efisien peningkatan mutu kakao ditempuh melalui penerapan teknologi pasca panen yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan upaya pengurangan hambatan-hambatan ekspor seperti potongan harga regulasi lain dari negara konsumen dapat dilakukan melalui perbaikan mutu secara berkelanjutan, kerjasama antara

kelompok tani dan eksportir maupun prosesor, serta menghindari publikasi yang berlebihan tentang hama dan penyakit tanaman kakao.

Dalam kegiatan pemberdayaan petani berperan dalam penyadaran berkelompok dan penyadaran akan fungsi setiap pengurus kelompok tani. Identifikasi pada norma menunjukkan bahwa program Gernas Kakao berdampak terhadap pembentukan nilai dan prinsip otonomi individu dalam kehidupan kelompok tani. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan sinergi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi program Gernas Kakao dan meningkatkan pelaksanaan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani peserta, sehingga Implementasi Program Gernas Kakao terealisasi di lapangan dan berdampak pada pengembangan Kelompok Tani. Kepada petani secara perorangan disarankan untuk memotivasi diri melaksanakan Kegiatan dalam Gernas Kakao dan secara kelembagaan kelompok tani disarankan untuk mengoptimalkan sarana dan fasilitas dari Gernas Kakao sebagai modal pengembangan kelompoknya, serta mengaplikasikan pola pasca panen yang tepat khususnya perlakuan fermentasi untuk mendapatkan nilai tambah dari kualitas dan mutu biji kakao dengan harga jual yang lebih baik. Kepada peneliti disarankan untuk mengkaji peran kelembagaan petani dalam optimalisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.

Perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap kakao Indonesia membuat pemerintah Indonesia berupaya mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut agar kakao Indonesia tetap dapat di ekspor ke luar negeri khususnya ke Uni Eropa dengan beban tarif yang sekecil-kecilnya. Organisasi kakao Internasional (ICCO) yang merupakan badan perkumpulan negara-negara produsen dan konsumen kakao dunia dipandang Indonesia merupakan salah satu jalan yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia merumuskan sebuah kebijakan untuk bergabung dalam keanggotaan ICCO. Melalui ICCO Indonesia dapat melobi Uni Eropa untuk menurunkan bea masuk kakao Indonesia bahkan ke tarif 0% sekalipun. Untuk resminya bergabung dalam ICCO, Indonesia meratifikasi *International Cocoa Agreement* (ICA) pada tahun 2012. Pemerintah Indonesia berupaya

meningkatkan standar nasional kualitas kakao sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh ICCO sehingga mutu kakao Indonesia tidak lagi menjadi persoalan bagi Negara-negara pengimpor kakao asal Indonesia. Perlunya dilakukan proses fermentasi terhadap biji kakao yang telah dikeringkan sebelum biji kakao tersebut di ekspor keluar negeri karena biji kakao yang telah difermentasi berharga lebih tinggi.

IV.2 SARAN

Momentum masuknya investasi baru di bidang industri pengolahan kakao tidak boleh disia-siakan. Sebaiknya saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan khususnya mengenai tarif bea keluar biji kakao. Karena setiap perubahan mengenai kebijakan tarif bea keluar biji kakao dapat menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan investor serta muncul kesan pemerintah tidak konsisten sehingga tidak mendukung kepastian usaha. Investasi baru di sektor industri pengolahan kakao telah mendorong bergeraknya ekonomi setempat. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan dukungan dalam bentuk perbaikan infrastruktur, ketersediaan energi serta insentif fiskal agar diperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pajak ekspor memiliki pengaruh terhadap volume ekspor, ketersediaan domestik dan harga domestik. Pajak ekspor memiliki hubungan negatif terhadap volume ekspor. Sedangkan volume ekspor memiliki hubungan negatif terhadap ketersediaan domestik dan pajak ekspor memiliki hubungan positif terhadap ketersediaan domestik. Pada ketersediaan domestik memiliki hubungan positif dengan harga domestik dan pajak ekspor memiliki hubungan negatif dan pengaruh signifikan terhadap harga domestik. Dari penelitian ini, pemerintah sebagai fasilitator dan regulator perlu membuat kebijakan yang menyeluruh. Mulai dari tingkat petani sampai kesiapan industri.

- Di sisi petani, perlu dilakukan terus pengembangan, penyuluhan, serta pengawasan mutu dari biji kakao yang dihasilkan petani. Selama ini petani masih belum mengutamakan kualitas. Persoalan mutu ini sebagai dampak ketidakjelasan regulasi kebijakan harga, antara biji kakao yang difermentasi dengan biji kakao yang difermentasi.

- Disisi industri, pemerintah perlu kesiapan dan regulasi pengembangan industri pengolahan biji kakao. Sehingga industri industri lokal tidak kalah bersaing dengan investasi asing.
- Pemerintah sendiri harus tetap memperhatikan volume ekspor biji kakao. Karena kondisi ini berpengaruh pada daya saing biji kakao Indonesia di pasar dunia dan berpengaruh pada sumber devisa. Negara. Pajak ekspor dengan tujuan mendatangkan devisa bagi pemerintah harus dapat berjalan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan kombinasi kebijakan pajak ekspor.

Untuk lebih memperkenalkan kakao dan produk kakao Indonesia di pasar UE, disarankan peran aktif dari pelaku usaha kakao Indonesia untuk mengikuti berbagai pameran yang diselenggarakan baik setiap tahun maupun dua tahunan. Keikutsertaan pada pameran bertaraf internasional yang diselenggarakan di UE baik sebagai peserta maupun sebagai peninjau akan membantu produsen/eksportir kakao Indonesia bertemu dengan mitranya yang ada di UE, sehingga diharapkan dapat dijangkau informasi dan peluang kerjasama pada kesempatan berikutnya.

